

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat tentang Pengawas Perikanan. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Perikanan di Provinsi Jawa Tengah, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengawas Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pengawasan perikanan di Provinsi Jawa Tengah?

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum. Datayang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan praktek pelaksanaan hukum positif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tertib pelaksanaan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud meliputi : kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pembenihan, mutu hasil perikanan, dan konservasi. Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah melakukan Pengawasan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan terdapat beberapa tugas pengawas yang terlaksana yaitu pengawasan dalam hal kegiatan penangkapan ikan di kapal perikanan, pengawasan di area pembudidayaan dan pemenuhan, dan konservasi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawas perikanan memiliki beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja pengawas perikanan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain : Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan masih kurangnya jumlah anggota pengawas perikanan padahal wilayah yang harus diawasi oleh pengawas perikanan sangat luas. Adapun saran yang dapat diberikan adalah 1) Perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, 2) Penambahan sarana dan prasarana dan juga jumlah personil pengawas perikanan dan penyidik perikanan.

Kata Kunci: Pengawas Perikanan, Provinsi Jawa Tengah